

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat, harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia jika kepala pemerintahan menerapkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga seorang kepala pemerintahan mau mengelola pemerintahan secara baik pula. Selama ini masyarakat sering memandang sinis terhadap pemerintahannya

sendiri, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah memiliki pemimpin pemerintahan menciptakan *good governance*, dimana kepala daerah mampu melayani masyarakat dengan baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemimpinnya.

Menurut Kaloh (2009:172), bahwa *good governace* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan serta pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Selain ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sering terdengar adanya kebijakan yang muncul tiba-tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritikan dari masyarakat. Semua ini terjadi karena kurang transparannya seorang kepala daerah dalam mengelola proses pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena pemerintahan desa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tersebut

terdiri atas pelayanan pulik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan.

Selain itu untuk menciptakan pemerintahan desa yang dapat mengelola tata pemerintahan yang baik (*good governance*), seorang pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan pegawai. Hal ini dapat perbaikan dari segi sistem penggajian yang terbaik dan pola rekrutmen dalam jabatan harus dibenahi, karena untuk merubah sistem birokrasi yang selama ini cenderung birokratis, inefisien, lamban, sering menyalahgunakan wewenang, serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme mejadi lebih fleksibel, efisien, cepat, akuntabilitas, dan bersih.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, pola hubungan yang selama ini menempatkan atasan dan bawahan sebagai suatu tingkatan yang kaku dan kurangnya komunikasi dan koordinasi. Pemerintahan yang seperti ini harus dirubah dalam pemerintahan desa untuk tetap mendapatkan pengakuan dari masyarakat desa sebagai tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya hal ini, diharapkan kepada pemerintah desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara baik, mampu menciptakan suasana baru dalam mengembangkan kreativitas masyarakat desa, serta mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana guna terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Laras Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Batasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Untuk lebih memudahkan penulisan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian pada:

1. Upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Laras Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.
2. Persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Laras Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

F. Manfaat Penelitian

a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat desa juga merupakan tujuan cita-cita bangsa Indonesia.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan masukan masyarakat sekitar dalam mengawasi pemerintahan ditingkat desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Bagi penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang arti dan pentingnya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat desa.

d. Bagi lurah

Menjadi bahan masukan bagi lurah dan staf-stafnya dalam menjalankan pemerintahan ditingkat desa, agar kelak dapat meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik sehingga terwujudnya suatu pemerintahan yang diidamkan masyarakat dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.